BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Pertama, Divisi Siliwangi merupakan salah satu cabang dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah Jawa Barat. Cikal bakal Terbentuknya Kodam III Siliwangi telah muncul semenjak kesatuan militer Indonesia dibentuk pada 5 Oktober 1945 atas usul Oerip Soemihardjo. Cikal bakal Kodam III Siliwangi adalah Detasemen I Jawa Barat yang pada mulanya dipimpin oleh Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Perubahan nama menjadi "Siliwangi" berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa Barat bahwa pada zaman Kerajaan Sunda, Jawa Barat memiliki tokoh terkemuka yaitu Prabu Siliwangi. Nama "Siliwangi" sendiri disahkan menjadi nama resmi Detasemen I Jawa Barat pada tahun 1946.

Divisi Siliwangi sesungguhnya terlibat dengan berbagai operasi militer di Indonesia, seperti operasi penumpasan RMS, DI/TII Sulawesi Selatan dll. Namun dengan wilayah operasinya yang berada di Jawa Barat, maka Divisi Siliwangi secara otomatis lebih terfokus kepada situasi dan kondisi yang terjadi di Jawa Barat. Dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI di Jawa Barat, Divisi Siliwangi terlibat dalam berbagai upaya menghalau upaya-upaya disintegrasi di Jawa Barat seperti gerakan DI/TII Jawa Barat dan aksi-aksi komunis pasca gerakan 30 September 1965.

Divisi Siliwangi mampu melahirkan tokoh-tokoh militer yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh yang diberikan oleh tokoh-tokoh Siliwangi tidak terbatas pada aspek militer saja, namun juga meluas dalam aspek non-militer seperti sosial-politik di Indonesia Beberapa tokoh militer terkemuka yang berasal dari Divisi Siliwangi adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kolonel Alex Evert Kawilarang, Kolonel R.A. Kosasih, Mayjen Ibrahim Adjie, Jenderal H.R Dharsono dan lain-lain sebagainya

Faruq Abdul Aziz, 2017
PERAN KODAM III SILIWANGI DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN NKRI DI JAWA BARAT TAHUN 1960-1966
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kedua, dalam menjalankan kewajibannya sebagai penanggung jawab atas persatuan dan kesatuan NKRI di Jawa Barat, Kodam III dihadapkan dalam situasi adanya pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Upaya-upaya penumpasan gerakan DI/TII Jawa Barat sempat mengalami kesulitan hingga tahun 1959 karena faktor politik Indonesia yang terjadi di ibu kota negara. Ketika tahun 1960, yaitu saat Divisi SIliwangi berada di bawah kepemimpinan Ibrahim Adjie sebagai Panglima Kodam III Siliwangi, Divisi Siliwangi meraih berbagai perkembangan dalam upaya penumpasan gerakan DI/TII Jawa Barat. Perkembangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik dan militer Indonesia yang pada akhirnya mendukung operasi militer skala besar dalam upaya menumpas gerakan DI/TII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo.

Berdasarkan strategi militer yang dihasilkan oleh divisi Siliwangi yang kemudian dikenal dengan RO 212, Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Jenderal Ibrahim Adjie melaksanakan perang anti-gerilya dengan mengajak warga agar turut serta membatasi ruang gerak anggota DI/TII Jawa Barat. Dengan strategi RO 212, Ibrahim Adjie dan divisi Siliwangi mampu menekan pergerakan DI/TII. Di bawah operasi pamungkas yaitu operasi Bratayudha yang dipimpin oleh Pangdam III Siliwangi Ibrahim Adjie, pasukan Siliwangi mampu melacak lokasi Kartosoewirjo di gunung Geber dan kemudian berhasil untuk mengamankannya. Dengan keberhasilan pasukan Siliwangi menangkap Kartosoewirjo, maka kemunduran gerakan DI/TII hanya tinggal menunggu waktu.

Di bawah pimpinan Ibrahim Adjie pula pasukan Divisi Siliwangi mengajak kepada setiap anggota gerakan DI/TII Jawa Barat untuk keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan diri. Penyerahan diri secara damai akhirnya dilakukan oleh anggota-anggota DI/TII dan menjadi tanda berakhirnya gerakan militer yang dilakukan DI/TII atas NKRI.

Ketiga, untuk merestorasi kondisi Jawa Barat yang mengalami berbagai kerusakan karena aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan DI/TII Jawa Barat, Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Ibrahim Adjie mengadakan Operasi Bhakti di berbagai wilayah di Jawa Barat. Operasi Bhakti merupakan operasi rehabilitasi dan normalisasi desa-desa di Jawa Barat. Operasi Bhakti dapat merupakan bentuk pengabdian divisi Siliwangi kepada masyarakat Jawa Barat. Dari sudut pandang masyarakat Jawa Barat, operasi Bhakti merupakan bantuan yang sangat berharga bagi masyarakat karena mampu mempercepat proses terbangunnya fasilitas-fasilitas umum di Jawa Barat seperti rumah sakit, sekolah, mesjid dan lain-lainnya.

Kebijakan operasi Bhakti yang dikeluarkan oleh Ibrahim Adjie selaku Pangdam III Siliwangi sejalan dengan instruksi presiden Soekarno dan Ahmad Yani sebagai KSAD dimana terdapat usulan untuk melaksanakan penguatan doktrin perang wilayah di setiap wilayah Indonesia agar dapat meningkatkan kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh setiap kesatuan tentara di Indonesia. Dalam sudut pandang kepentingan militer, operasi Bhakti merupakan langkah tepat dalam membina doktrin perang wilayah di Jawa Barat. Dengan diprakarsainya operasi Bhakti oleh Ibrahim Adjie, maka akan timbul kedekatan lebih di antara pasukan Siliwangi dan masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut tentu akan memberikan keuntungan bagi pihak militer dalam mencegah dan menghadapi berbagai ancaman keamanan yang mungkin bisa muncul di Jawa Barat.

Keempat, kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak menentu pada tahun 1965-1966 turut memanaskan kondisi Indonesia secara keseluruhan pasca tewasnya tujuh perwira tinggi Angkatan Darat. Kekerasan sosial dalam skala besar terjadi di berbagai lokasi di Indonesia, baik di pulau Jawa ataupun luar pulau Jawa. Dalam menghadapi kondisi politik dan sosial Indonesia yang semakin memanas, Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Ibrahim Adjie memilih untuk menyikapi peristiwa Gerakan 30 September 1965 dengan lebih dingin dan meminimalisir potensi-potensi kekerasan yang bisa terjadi di Jawa Barat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh

Divisi Siliwangi adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembantaian rakyat sipil seperti yang terjadi di berbagai tempat lain di Indonesia.

Divisi Siliwangi yang pada saat itu dipimpin Jenderal Ibrahim Adjie beserta gubernur Jawa Barat pada masa itu yaitu Mashudi berinisiatif untuk menangkap dan mengamankan tokoh-tokoh pemerintahan yang berasal dari PKI dan membubarkan PKI Jawa Barat agar tidak terjadi penghakiman massa kepada bagian dari PKI Jawa Barat. Sebagai Panglima Kodam III Siliwangi, Ibrahim Adjie mengeluarkan instruksi kepada setiap anggotanya untuk menahan diri dan tidak memberi dukungan kepada masyarakat untuk melakukan upaya-upaya penghakiman sepihak seperti yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah-daerah lainnya. Penolakkan Ibrahim Adjie atas kedatangan RPKAD ke Jawa Barat juga merupakan salah satu penyebab utama tidak adanya pembantaian warga di Jawa Barat. Dengan koordinasi yang baik antara gubernur Mashudi dan jenderal Pangdam III Siliwangi Ibrahim Adjie, serta keseragaman pemahaman divisi Siliwangi dalam melaksanakan perintah atasannya, maka peristiwa pembantaian di Jawa Barat pasca gerakan 30 September 1965 dapat dihindarkan.

5.2. Saran

Skripsi yang berjudul *Peran Kodam III Siliwangi Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Di Jawa Barat Tahun 1960-1966* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Bagi Sekolah Menengah Atas, kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sumber belajar maupun bacaan pada mata pelajaran sejarah kelas XII yang ada pada standar kompetensi 1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru, dengan kompetensi dasar 1.3. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Aziz, RMS, PRRI,

Permesta, G-30-S/PKI). Semoga dengan adanya penelitian ini siswa di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) mampu memperluas wawasannya dan menambah pengetahuannya untuk mendalami sejarah nasional Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kajian pustaka yang digunakan dalam menyusun skripsi ini salah satunya adalah dengan mengkaji penelitian terdahulu berupa skripsi - skripsi ataupun tesis yang memiliki sedikit kesamaan dalam tema yang diangkat. Oleh sebab itu, skripsi ini pun penting untuk peneliti selanjutnya dalam menulis tentang divisi Siliwangi pada masa H.R Dharsono sebagai salah satu Pangdam Siliwangi paling berpengaruh dalam perjalanan sejarah Orde Baru.

3. Bagi Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia

Bagi Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), skripsi ini diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai sejarah Indonesia pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin khususnya peranan tokoh - tokoh dalam usaha menjaga stabilitas keamanan Nasional Indonesia.